KLIPING BERITA MEDIA MASSA

Jumat, 19 Maret 2021

BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

KATA PENGANTAR

Klipping Media Massa adalah kumpulan guntingan berita yang kami sajikan secara rutin. Guntingan berita ini kami seleksi dari berita yang muncul di media online dan media cetak. Adapun tema berita yang kami pilih adalah berita yang berkaitan dengan organisasi dan substansi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan yang berkaitan dengannya.

Kami berharap klipping ini bermanfaat untuk monitoring media BPIW.

Hormat kami

Tim penyusun

DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Antaranews.com	Jumat, 19 Maret 2021	Mencari Solusi Rumah Bagi MBR	Tidak dapat dipungkiri memiliki rumah pribadi menjadi impian banyak orang. Namun, tidak semua orang bisa mencapainya khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah atau MBR. Dirjen Pembiayaan Infrastuktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR, Eko D Heripoerwanto, mengungkapkan sebenarnya pemerintah sudah berupaya menyediakan rumah bagi MBR. https://finance.detik.com/foto-bisnis/d-5498601/mencari-solusi-rumah-bagi-mbr/3 https://www.suara.com/news/2021/03/18/170058/program-sejuta-rumah-kementerian-pupr-soroti-pentingnya-kualitas-bangunan https://kumparan.com/kumparanbisnis/masyarakat-berpenghasilan-rendah-susah-punya-rumah-apa-solusi-pemerintah-1vNbdA199qh https://www.antaranews.com/berita/2050270/menteri-pupr-kinerja-penyaluran-subsidi-rumah-bantu-ekonomi-rebound
2	Kompas.com	Jumat, 19 Maret 2021	Mengenal SiPetruk, SiKasep dan SiKumbang, Aplikasi Perumahan Subsidi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memiliki sejumlah sistem berbasis aplikasi dan website untuk perumahan subsidi dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Sistem berbasis aplikasi tersebut adalah Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan (SiKasep), Sistem Pemantauan Konstruksi (SiPetruk), dan situs Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (SiKumbang). https://www.kompas.com/properti/read/2021/03/18/200000421/mengenal-sipetruk-sikasep-dan-sikumbang-aplikasi-perumahan-subsidi.
3	Kompas.com	Jumat, 19 Maret 2021	Menteri PUPR Resmikan Tol Layang AP Pettarani Makassar	Jalan Tol Layang AP Pettarani (Tol Ujung Pandang Seksi 3) Makassar siap dibuka untuk umum secara gratis mulai Jumat (19/03/2021), pukul 00.00 WITA. Ikon baru kebanggaan Kota Makassar sepanjang 4,3 kilometer ini telah diresmikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono pada Kamis (18/03/2021). https://www.kompas.com/properti/read/2021/03/18/220000021/mulai-jumat-tol-layang-ap-pettarani-dibuka-gratis-untuk-umum?page=1.

				https://makassar.sindonews.com/read/368344/710/jalan-tol-layang-pettarani-makassar-resmi-dioperasikan-1616043802 https://www.merdeka.com/peristiwa/menteri-pupr-resmikan-tol-layang-ap-pettarani-makassar.html https://www.antaranews.com/berita/2049766/menteri-pupr-resmikan-tol-layang-pettarani https://market.bisnis.com/read/20210318/192/1369472/tol-layang-pettarani-milik-nusantara-infrastructure-meta-beroperasi-fungsional-besok https://regional.kontan.co.id/news/jalan-tol-layang-ap-pettarani-makassar-diresmikan-dan-siap-beroperasi?page=all\ https://www.beritasatu.com/ekonomi/747403/menpupera-resmikan-jalan-tol-layang-ap-pettarani
4	Bisnis.com	Jumat, 19 Maret 2021	PUPR: Revitalisasi Danau Tidak Melulu Revitalisasi Fisik	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan akan tetap melakukan revitalisasi danau kritis sepanjang 2021 akan lebih dari tiga danau. Namun demikian, revitalisasi fisik hanya akan dilakukan pada tiga danau. Direktur Bendungan dan Danau Kementerian PUPR Airlangga Mardjono mengatakan kajian, pembuatan desain, dan penetapan sempadan juga termasuk dalam kegiatan revitalisasi danau kritis. Menurutnya, revitalisasi danau tidak harus melulu pekerjaan fisik. https://ekonomi.bisnis.com/read/20210318/45/1369460/pupr-revitalisasi-danau-tidak-melulu-revitalisasi-fisik
5	Kumparan.com	Jumat, 19 Maret 2021	Istana Presiden di Ibu Kota Baru Dibangun Tahun Ini, PUPR Siapkan Desainnya	Pemerintah berencana memulai groundbreaking pembangunan Istana Kepresidenan di ibu kota baru pada tahun 2021. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sudah menyiapkan desainnya. Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Diana Kusumastuti, mengungkapkan desain pastinya saat masih dimatangkan. https://kumparan.com/kumparanbisnis/istana-presiden-di-ibu-kota-baru-dibangun-tahun-ini-pupr-siapkan-desainnya-1vNSAlp0VLm

6	Akurat.co	Jumat, 19 Maret 2021	KemenPUPR Salurkan Dana Rp69,4 Miliar untuk Program Bedah Rumah di Aceh	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) siap mendorong penyaluran dana program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) di Provinsi Aceh senilai Rp69,4 miliar melalui Bank Syariah Indonesia (BSI). "Kami menggandeng Bank Syariah Indonesia untuk penyaluran dana program BSPS di Provinsi Aceh," ujar Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Sumatera I Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Teuku Faisal Riza dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (18/3/2021). https://akurat.co/ekonomi/id-1286626-read-kemenpupr-salurkan-dana-rp69-4-miliar-untuk-program-bedah-rumah-di-aceh

Judul	**Menteri PUPR Resmikan Tol Layang AP Pettarani Makassar**	Tanggal	19 Maret 2021
Media	Media Indonesia (Halaman, 9)		
Resume	Satu demi satu infrastruktur penting di daerah tuntas dibangun. Kemarin, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono meresmikan pengoperasian Tol Layang AP Pettarani atau Tol Ujung Pandang Seksi 3. Ia menambahkan Tol Layang Makassar ini merupakan infrastruktur yang pendanaannya murni dari pihak swasta, yaitu PT Nusantara Infrastructure TBK. "Bagi Nusantara Infrastructure, ini merupakan tol yang ketiga di Indonesia."		

Keroyokan BUMN di Kota Wisata Dunia

Sebanyak 19 BUMN sepakat mengucurkan dana tanggung jawab sosial demi membantu warga Manggarai Barat. Dana CSR akan digunakan untuk modal usaha rakyat dan perbaikan sekolah.

John Lewar
lewar@mediaindonesia.com

BULAN pertama memimpin roda pembangunan di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Edistasius Endi sudah mendapat kabar baik. Sebanyak 19 BUMN akan bergotong royong membantu percepatan pertumbuhan ekonomi di wilayah itu.

"Kita menuju kota wisata dunia. Hari ini, saya bertemu perwakilan 19 BUMN yang menyatakan kesediaan bergotong royong membantu Manggarai Barat," papar sang bupati, kemarin.

Tahun ini, upaya penguatan percepatan pembangunan dan pertumbuhan usaha masyarakat akan dilakukan di semua sektor. BUMN mengambil bagian untuk membangun upaya peningkatan usaha kerakyatan dengan dana tanggung jawab sosial (CSR) mereka.

"Di antaranya, mereka akan menyediakan dukungan modal usaha bagi warga sehingga peningkatan ekonomi bisa terwujud. Dalam rapat disepakati, ke-19 BUMN akan memberikan dana CSR untuk digunakan sesuai rencana pemerintah daerah," tambah Edistasius.

Dalam rencana pemkab, selain sebagai modal bergulir, dana patungan CSR BUMN juga akan disalurkan untuk pembangunan fasilitas pemasaran produk UMKM dan perbaikan sekolah. "Kami pastikan semua fasilitas itu akan bermanfaat bagi banyak orang," tandasnya.

Tol swasta

Satu demi satu infrastruktur penting di daerah tuntas dibangun. Kemarin, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono meresmikan pengoperasian Tol Layang AP Pettarani atau Tol Ujung Pandang Seksi 3.

"Konstruksi tol sudah dituntaskan pada September 2020. Seminggu ke depan gratis dulu, setelah itu baru dilanjutkan dengan tarif operasional," jelas Menteri Basuki.

Ia menambahkan Tol Layang Makassar ini merupakan infrastruktur yang pendanaannya murni dari pihak swasta, yaitu PT Nusantara Infrastructure TBK. "Bagi Nusantara Infrastructure, ini merupakan tol yang ketiga di Indonesia."

Pemerintah, lanjut Basuki, akan mendorong swasta untuk berinvestasi dalam infrastruktur jika secara ekonomi memang menguntungkan. Namun, saat swasta tidak tertarik, pemerintah akan mengambilnya bekerja sama dengan BUMN.

Direktur PT Nusantara Infrastructure Ramdani Basri menyatakan tol layang sepanjang 4,3 kilometer itu mulai dikerjakan pada Maret 2018. Total investasi mencapai Rp2,24 triliun.

Sementara itu, di Sumatra Selatan, perkembangan pembangunan Tol Indralaya-Prabumulih membuat Gubernur Herman Deru bungah. "Jalannya sudah kencang," ungkapnya. Ruas tol yang menjadi bagian Tol Trans-Sumatra ini mencapai 65 kilometer. Targetnya pada Mei 2022, ruas ini sudah bisa dioperasikan.

"Ruas ini merupakan jawaban atas impian dan keinginan masyarakat sejak bertahun-tahun lalu. Jalan tol ini cara terbaik menjawab kebutuhan sarana transportasi yang semakin modern," ungkap Herman Deru.

Ia juga berpesan agar Tol Indralaya-Prabumulih menonjolkan ciri khas kearifan lokal dalam fasilitasnya. "Dari mulai ornamen jembatan, pintu tol, dan *rest area* harus berbau kearifan lokal."

Di Jawa Tengah, Bupati Blora Arief Rohman mendapat kabar baik dari Maskapai Citilink. "Mereka sepakat membuka rute Bandara Ngloram, Blora-Halim Perdanakusuma, Jakarta, dua kali sepekan." (LN/DW/AS/N-2)

Judul	**JAMIN MUTU RUMAH RAKYAT DENGAN ”SIPETRUK**	Tanggal	19 Maret 2021
Media	Kompas, Rubrik JENDELA Halaman B		
Resume	Hasil survei pemantauan dan evaluasi oleh Direktorat Evaluasi Bantuan Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Januari-Agustus 2017, menemukan, 36,42 persen dari 14.393 sampel rumah yang disurvei bermasalah terkait kualitas rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas pendukung		

JAMIN MUTU RUMAH RAKYAT DENGAN ”SIPETRUK”

Tata kelola pembangunan rumah massal yang baik dibutuhkan untuk menjamin kualitas hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan memanfaatkan teknologi, aplikasi sistem pemantauan konstruksi atau SiPetruk diharapkan dapat mengefektifkan dan mengefisienkan pengawasan pembangunan rumah rakyat tersebut.

CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO/ MUKHAMAD KURNIAWAN

Rumah merupakan kebutuhan dasar bagi setiap orang atau warga negara. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, negara bertanggung jawab untuk memastikan setiap orang menghuni rumah yang layak dan terjangkau. Terkait itu, pemerintah bertugas mengalokasikan anggaran pembangunan dan memfasilitasi penyediaan perumahan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Amanat undang-undang diwujudkan pemerintah, antara lain, melalui program rumah bersubsidi. Sayangnya, pemenuhan kebutuhan dasar akan papan hingga kini belum seimbang antara suplai dan kebutuhan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat, angka kekurangan rumah (*backlog*) mencapai 7,6 unit. Namun, angka itu berpotensi naik karena kebutuhan rumah diperkirakan bertambah 800.000 unit per tahun seiring bertambahnya keluarga baru, sementara suplainya kerap menghadapi hambatan, terutama dari sisi penyediaan lahan.

Hasil survei pemantauan dan evaluasi oleh Direktorat Evaluasi Bantuan Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Januari-Agustus 2017, menemukan, 36,42 persen dari 14.393 sampel rumah yang disurvei bermasalah terkait kualitas rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas pendukung.

Problem itu, antara lain, berupa kondisi fisik bangunan yang belum layak huni, butuh renovasi, dan prasarana umum yang belum siap. Akibatnya, masyarakat berpenghasilan rendah yang mengaksesnya tidak dapat menghuni rumah tersebut. Pemanfaatan rumah subsidi pun jadi tidak optimal. Oleh karena itu, pengawasan yang lebih efektif diperlukan untuk memastikan rumah yang dibangun memenuhi segenap standar kelayakan.

Tukang merampungkan pembangunan rumah di kompleks perumahan baru yang dibangun di kawasan Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (9/2/2021).

Aplikasi

Terkait kebutuhan itu, Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR meluncurkan aplikasi SiPetruk pada Desember 2020. Sepanjang Januari-Mei 2021 dilakukan sosialiasi, pelatihan, dan uji coba aplikasi SiPetruk. Uji coba akan dievaluasi Juni 2021 sebelum kemudian aplikasi SiPetruk diterapkan pada Juli 2021.

"Kami harus melindungi MBR (masyarakat berpenghasilan rendah). MBR menjadi subyek, bukan lagi obyek," kata Direktur Utama PPDPP Arief Sabaruddin pada diskusi daring Forum Wartawan Perumahan Rakyat bertema "Memastikan Efektivitas SiPetruk dalam Penyediaan Rumah Rakyat Berkualitas", Rabu (17/3/2021).

Sebagai gambaran, PPDPP pada 19 Desember 2019 meluncurkan aplikasi Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan (SiKasep). Aplikasi SiKasep ini sebagai induk dari rangkaian sistem informasi yang mengusung konsep mahadata perumahan yang menyajikan data pasokan dan permintaan perumahan di Indonesia secara *real time* (waktu nyata).

Aplikasi SiKasep ditujukan untuk memudahkan masyarakat mencari rumah subsidi yang disediakan pemerintah. Data kebutuhan rumah subsidi dapat diketahui berdasarkan jumlah pengguna aplikasi SiKasep.

Pemerintah selanjutnya mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (SiKumbang) untuk membantu pengembang memasarkan rumah subsidi yang terhubung aplikasi SiKasep. Data rumah subsidi yang dimasukkan pengembang dapat dijadikan acuan sebagai data ketersediaan rumah di Indonesia.

Demi menjamin kualitas rumah subsidi yang akan diterima masyarakat sesuai standar, rumah yang telah dimasukkan oleh pengembang melalui aplikasi SiKumbang akan dihubungkan dengan aplikasi SiPetruk untuk diperiksa kelayakan fungsi bangunannya.

"Jadi, sistemnya hanya satu. Aplikasi kami adalah SiKasep. Namun, ada beberapa pintu. Masyarakat, termasuk pengembang, bisa masuk lewat SiKasep. Pengembang lewat SiKumbang. SiPetruk adalah pintu MK (manajemen konstruksi) mengawasi produk-produk yang dibangun oleh kontraktor dari pengembang," kata Arief.

Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (Asprumnas) Muhammad Syawali menyatakan, kualitas konstruksi sebuah bangunan mesti menjadi prioritas semua pihak. "Tanpa ada dukungan dari semua pihak, program yang diluncurkan oleh PPDPP rasanya seperti angin lalu atau isapan jempol saja," ujarnya.

Syawali menambahkan, pihaknya mendukung aplikasi SiPetruk yang dikembangkan PPDPP karena akan menjadi sistem pemantau, pemberi informasi, dan modal untuk menjadikan kualitas konstruksi semakin baik.

Tenaga bersertifikat

Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Dewi Chomistriana menyampaikan arti penting penyediaan tenaga ahli berkualitas dalam mendukung pembangunan rumah bermutu. Salah satu tantangannya adalah kekurangan jumlah tenaga kerja konstruksi bersertifikat di Indonesia.

Menurut Dewi, dengan rata-rata anggaran Kementerian PUPR 2015-2020 sebesar Rp 110 triliun per tahun, kebutuhan tenaga kerja konstruksi diperkirakan mencapai 1,5 juta tenaga kerja per tahun. Hal ini dengan asumsi setiap Rp 1 triliun pekerjaan konstruksi membutuhkan 14.000 tenaga kerja konstruksi.

"(Kebutuhan) ini belum termasuk untuk alokasi pembangunan infrastruktur dan perumahan yang dibangun oleh swasta, APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), dan sumber pendanaan lainnya," kata Dewi.

Kementerian PUPR mencatat, dari total 8.066.497 tenaga kerja konstruksi di Indonesia pada 2020, tenaga kerja konstruksi yang telah memiliki sertifikat baru 778.472 orang atau 9,6 persen. Rinciannya, 212.188 tenaga ahli dan 566.284 tenaga kerja konstruksi terampil.

Dengan demikian, terjadi kesenjangan kebutuhan tenaga kerja konstruksi bersertifikat untuk memenuhi pekerjaan konstruksi PUPR sebanyak 721.528 orang. "Komposisinya pun belum ideal karena 72 persen tenaga kerja konstruksi lulusan SMA ke bawah," ujar Dewi.

Judul	**Tol Layang Makassar**	Tanggal	19 Maret 2021
Media	Bisnis Indonesia , Halaman 6 dan 16		
Resume	Berita Foto		

TOL LAYANG MAKASSAR

Bisnis/Paulus Tandi Bone

Foto udara jalan tol layang AP Pettarani Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (18/3). Jalan tol layang sepanjang 4,3 kilometer tersebut menelan investasi Rp2,3 triliun.

BTN DUKUNG PEMBIAYAAN PERUMAHAN

Bisnis/Arief Hermawan P.

Direktur Consumer and Commercial Lending PT Bank Tabungan Negara Tbk. (BTN) Hirwandi Gafar (*dari kiri*) berbincang dengan Komisioner BP Tapera Adi Setianto, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Eko D. Heripoerwanto, Direktur Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan Kementerian ATR/BPN Perdananto Aribowo dan Direktur Rumah Umum dan Komersial, Ditjen Perumahan Kementerian PUPR Fitrah Nur di sela-sela diskusi Solusi Rumah untuk MBR di Jakarta, Kamis, (18/3).